



Ketiga Kali

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, di Ruang Balairung Sari, Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (13/05).

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara, bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pro-

vinci Kalbar Tahun 2021 telah sesuai akuntansi pemerintah berbasis aktual.

"Maka, Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," tutur Nyoman Adhi Suryadnyana.

Ia juga mengatakan capaian tersebut patut disyukuri sebab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mampu mempertahankan tiga kali opini yang sama sejak tahun 2019.

Menurutnya, pencapaian ini berkat usaha, kerja keras, dan sinergi yang baik, antara pimpinan dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh pemangku kepentingan, salah satunya BPK-RI yang tidak henti memberikan arahan kepada Pemprov Kalbar agar kualitas laporan keuangan semakin baik. **(lut)**